

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM)

Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) adalah suatu sistem pengelolaan sumberdaya hutan yang dilakukan bersama oleh Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan atau Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan dengan pihak yang berkepentingan (*Stakeholder*) dengan jiwa berbagi, sehingga kepentingan bersama untuk mencapai keberlanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan dapat diwujudkan secara optimal dan proporsional (Perum Perhutani, 2001).

PHBM adalah pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang berarti masyarakat menjadi pelaku utama pengelolaan hutan. Masyarakat yang dimaksud adalah kelompok masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar hutan dan bergantung kepada hutan untuk memenuhi kehidupannya (ekonomi, politik, religius, dan lainnya). Kata kunci berbasis menunjuk pada peran atau partisipasi masyarakat sebagai satu kesatuan yang membangun institusi dan pola hubungan sosial sehingga pengelolaan hutan berjalan menuju pada pencapaian kelestarian hutan, keadilan sosial, dan kemakmuran ekonomi (Suharjito 1994).

Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) adalah suatu program dari Perum Perhutani yang dicetuskan pada tahun 1999. Konsep PHBM ini lahir sebagai manifestasi dari adanya perubahan paradigma yang terjadi di tubuh Perhutani. Dalam menerapkan PHBM, Perhutani mengeluarkan SK Direksi No. 136/KPTS/2001 sebagai kebijakan perusahaan. Program PHBM ini bermaksud untuk meningkatkan hubungan yang harmonis antara pengelola hutan (Perhutani) dengan masyarakat disekitarnya dengan cara berbagi kewenangan dan berbagi hasil pengelolaan (Affianto, 2005).

Tujuan dari Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) menurut Perum Perhutani adalah:

1. Meningkatkan tanggung jawab perusahaan, masyarakat desa hutan dan pihak yang berkepentingan terhadap keberlanjutan fungsi dan sumberdaya hutan.
2. Meningkatkan peran perusahaan, masyarakat desa hutan dan pihak yang berkepentingan terhadap pengelolaan sumberdaya hutan.

3. Menselaraskan kegiatan pengelolaan sumberdaya hutan sesuai dengan kegiatan pembangunan wilayah, sesuai dengan kondisi dan dinamika sosial masyarakat desa hutan
4. Meningkatkan mutu sumberdaya hutan sesuai dengan karakteristik wilayah

Hak dan kewenangan masyarakat dalam PHBM harus sejalan dengan kewajiban yang perlu dilakukan masyarakat. Kewajiban-kewajiban tersebut mencakup: (1) bersama Perum Perhutani menjaga dan melindungi sumberdaya hutan untuk keberlanjutan fungsi dan manfaatnya; (2) memberikan kontribusi faktor produksi; (3) mempersiapkan kelompok untuk mengoptimalkan fasilitasi yang diberikan oleh Perum Perhutani. Di sisi lain, Perum Perhutani juga memiliki hak yang tidak jauh berbeda dengan masyarakat dalam kegiatan PHBM namun dengan penekanan bahwa pihak Perum Perhutani memiliki hak untuk mendapatkan dukungan aktif masyarakat desa hutan dalam menjaga kelestarian hutan. Dalam hal kewajiban, Perum Perhutani wajib untuk memberikan fasilitas dan persiapan yang memadai bagi terciptanya kondisi yang baik untuk pelaksanaan PHBM di tingkat masyarakat. Selain itu, Perum Perhutani wajib untuk bekerjasama dengan berbagai pihak yang berpotensi guna mendorong optimalisasi dan pengembangan kegiatan PHBM.

Prinsip-prinsip dasar Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) yang tertera di dalam keputusan ketua dewan pengawas Perum Perhutani No. 136/KPTS/DIR/2001 adalah:

1. Prinsip keadilan dan demokratis
2. Prinsip keterbukaan dan kebersamaan
3. Prinsip pembelajaran bersama dan saling memahami
4. Prinsip kejelasan hak dan kewajiban
5. Prinsip pemberdayaan ekonomi kerakyatan
6. Prinsip kerjasama kelembagaan
7. Prinsip perencanaan partisipatif
8. Prinsip kesederhanaan sistem dan prosedur
9. Prinsip perusahaan sebagai fasilitator
10. Prinsip kesesuaian pengelolaan dan karakteristik wilayah

2.2 Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH)

Lembaga adalah wadah dimana sekumpulan orang berinisiatif untuk memenuhi kebutuhan bersama, dan yang berfungsi mengatur akan kebutuhan bersama tersebut dengan nilai dan aturan bersama. Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) adalah satu lembaga yang dibentuk oleh masyarakat desa yang berada didalam atau disekitar hutan untuk mengatur dan memenuhi kebutuhannya melalui interaksi terhadap hutan dalam konteks sosial, ekonomi, politik dan budaya. Pada dasarnya kelembagaan itu merupakan kelompok belajar bagi masyarakat desa hutan untuk menumbuhkan kesadaran baru akan pentingnya melindungi dan mengamankan hutan secara bersama, serta mendorong perubahan pengetahuan, sikap dan ketrampilan dikalangan masyarakat desa hutan (Rahardjo dan Kahathur, 2006). Menurut Sri Sudaryanti (2002), pembentukkan kelompok pada masyarakat yang tinggal di sekitar desa hutan merupakan upaya untuk mewujudkan keberhasilan pelaksanaan pengelolaan hutan bersama masyarakat.

Kelompok yang dibentuk tersebut dapat merupakan sarana masyarakat desa hutan menyampaikan aspirasi dan atau menerima informasi dari pihak Perum Perhutani, sehingga hubungan antara keduanya diharapkan terjalin dengan baik. Selain itu kelompok dapat berfungsi sebagai wadah kerjasama antara pesanggem (anggota kelompok) dalam hal ini adalah modal, tenaga kerja dan informasi serta lebih efektif melakukan kontrol sosial (Wong dalam Suharjito 1994). Kehadiran ketua sebagai pemimpin dalam kelompok sangat penting.

2.3 Kelompok Tani Hutan (KTH)

Kelompok Tani Hutan (KTH) merupakan perkumpulan orang-orang yang menyatukan diri dalam usaha-usaha dibidang pengelolaan tanah hutan negara yang tumbuh dan berkembang dari, oleh dan untuk meningkatkan taraf hidup masing-masing anggotanya dalam rangka kepentingan bersama (Perum Perhutani, 1987 dalam Permana, 1998).

Tujuan pembentukan KTH adalah untuk melancarkan komunikasi dua arah antara pihak pesanggem dan pihak Perum Perhutani. Kedua, karena sasaran program adalah anggota masyarakat yang berlahan sempit dan petani tidak berlahan, maka adanya kelompok dapat berfungsi sebagai wadah kerjasama antar

pesanggem : modal, tenaga kerja, informasi dan pemasaran hasil. Petani berlahan luas dapat mengelola lahannya secara efisien mereka mampu meningkatkan produktivitasnya melalui input-input teknologi yang membutuhkan modal seperti pengolahan tanah, pupuk, pengairan, sedangkan petani berlahan sempit tidak mampu menanggung biaya sendiri untuk masukan teknologi tersebut. Dengan cara berkelompok petani sempit dapat meningkatkan efisiensi dalam hal modal, tenaga kerja, dan informasi, serta lebih efektif melakukan kontrol sosial (Wong, 1979 dalam Suharjito, 1994; Cernea, 1990 dalam Suharjito, 1994). Mulyana (2001) menyatakan kriteria pemilihan petani sebagai KTH itu adalah kedekatan dengan hutan, hak-hak yang sudah ada, ketergantungan dan pengetahuan lokal. Keempat dimensi tersebut sangat erat kaitannya dengan sumber daya hutan dan mudah untuk dikenali. Selanjutnya ia menyatakan proses pembentukan KTH adalah sebagai berikut :

1. Pembentukan kelompok
2. Penguatan Kelembagaan
3. Penyuluhan
4. Insentif

Pengertian pembinaan KTH menurut Suharjito, adalah suatu proses yang timbul dalam suatu hubungan antara pembina (petugas Perum Perhutani bersama dengan instansi terkait) dengan kelompok binaan (KTH) dalam upaya menemukan dan memecahkan masalah atau mengembangkan kegiatan kelompok. Tujuan pembinaan tentunya tidak terlepas dari tujuan program Perhutanan Sosial, khususnya jangka menengah dan jangka panjang, yaitu KTH berfungsi sebagai mitra dalam pembangunan dan pengelolaan hutan dan tercapainya partisipasi masyarakat yang bertanggung jawab dalam pembangunan hutan dan lingkungan. Suharjito (1994) menyatakan bahwa, proses pembentukan KTH terdapat dua kegiatan yaitu :

1. Persiapan dan Rekrutmen

Dalam “Pedoman Pelaksanaan Program Perhutanan Sosial” (SK. Direksi Perum Perhutani No. 602/Kpts/Dir/1988 tanggal 18 Juni 1988) disebutkan pola pendekatan masyarakat antara lain tentang pembentukan KTH sebagai berikut :
(a) dilakukan secara formal melalui rapat desa atau pertemuan lainnya, (b)

pencarian pemrakarsa untuk membantu kelancaran dan kemudahan untuk menghimpun anggota KTH. Pemrakarsa dipilih dari tokoh masyarakat maupun aparat desa, (c) calon anggota diprioritaskan dari masyarakat desa sekitar hutan dengan kriteria : tingkat pendapatan rendah, lahan garapan yang dimiliki tidak memadai atau tidak memiliki lahan pertanian, sanggup bekerja di hutan, memiliki keterampilan khusus sesuai dengan perjanjian, dan (d) seleksi anggota KTH dilakukan oleh KRPH, dapat bersama-sama dengan kepala desa atau pemrakarsa. Namun dalam pelaksanaannya petugas lapangan yang menetapkan.

2. Pembentukan Kelompok

Setelah pembagian andil barulah mulai menyatukan pesanggem ke dalam kelompok atau sub kelompok. Jika semua pesanggem berasal dari dusun yang sama, maka mereka dikelompokkan ke dalam satu kelompok dengan sub kelompok berdasarkan kedekatan rumah. Namun jika mereka berasal dari dua atau lebih dusun mereka dikelompokkan ke dalam satu atau lebih kelompok berdasarkan dusun masing-masing. Namun pegangan utama petugas lapangan Perhutani bukanlah atas dasar atau dusun atau kedekatan rumah tinggal, melainkan petak tanaman

2.4 Dinamika Kelompok

Di dalam setiap sistem sosial selalu terdapat keinginan dari masing-masing individu untuk menyatu baik berdasarkan keinginan bersama, keyakinan yang sama, tujuan yang sama, asal usul yang sama dan sebagainya. Hal ini merupakan suatu keinginan yang wajar karena dalam diri manusia sebagai makhluk sosial selalu mempunyai keinginan untuk berkumpul atau berkelompok. Dinamika Kelompok berasal dari kata dinamika dan klompok. Dinamika dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti tenaga yang menggerakkan semangat, sedangkan kelompok adalah dua atau lebih orang yang berinteraksi dan saling mempengaruhi untuk mencapai suatu tujuan bersama. Kelompok adalah dua atau lebih orang yang berhimpun atas dasar adanya kesamaan, berinteraksi melalui pola/struktur tertentu guna mencapai tujuan bersama dalam kurun waktu yang relatif panjang. Menurut Mardikanto (1993), kelompok adalah himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama sehingga terdapat hubungan timbal balik dan saling

mempengaruhi serta memiliki kesadaran untuk saling tolong menolong. Dari definisi tersebut jelas bahwa kelompok merupakan kumpulan orang yang memiliki tujuan, sedangkan kumpulan orang yang tidak memiliki tujuan tidak dapat disebut sebagai kelompok.

Kelompok-kelompok dari sistem sosial tersebut tidak statis tetapi dinamis atau bergerak, hidup, aktif dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pergerakan kekuatan yang ada dalam kelompok itulah yang disebut dinamika kelompok. Dinamika kelompok diartikan sebagai suatu studi yang menganalisis berbagai kekuatan yang menentukan perilaku anggota dan perilaku kelompok yang menyebabkan terjadinya gerak perubahan dalam kelompok untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan (Syamsu *et al.* 1991). Dinamika kelompok merupakan kajian terhadap kekuatan-kekuatan yang terdapat di dalam maupun di lingkungan kelompok yang akan menentukan perilaku anggota kelompok dan perilaku kelompok yang bersangkutan, untuk bertindak atau melaksanakan kegiatan-kegiatan demi tercapainya tujuan bersama yang merupakan tujuan kelompok tersebut (Mardikanto 1992). Dinamika kelompok akan mencakup faktor-faktor yang menyebabkan suatu kelompok hidup, bergerak, aktif dan efektif dalam mencapai tujuannya.

Analisis terhadap dinamika suatu kelompok bisa dilakukan dengan melihat dimensi atau unsur-unsur yang mempengaruhi dinamika kelompok tersebut. Unsur-unsur yang mempengaruhi dinamika kelompok yaitu :

1. Tujuan kelompok diartikan sebagai apa yang ingin dicapai oleh kelompok (Slamet 1978). Purwanto dan Huraerah (2006) mendefinisikan tujuan kelompok sebagai hasil akhir atau keadaan yang diinginkan oleh semua anggota kelompok. Sutarto (1993) membedakan tujuan kelompok menjadi tujuan pokok dan tujuan tambahan, tujuan jangka panjang dan tujuan jangka pendek serta tujuan individu. Menurut Slamet (1978), tujuan kelompok harus memiliki hubungan antara tujuan pribadi anggota-anggotanya, kejelasan dan formalitas tujuan kelompok. Tujuan ini sangat penting artinya bagi suatu kelompok, sehingga dapat menentukan arah kegiatan kelompok dan kedinamisan suatu kelompok.

2. Struktur kelompok didefinisikan sebagai bagaimana kelompok itu mengatur dirinya sendiri dalam mencapai tujuan yang ingin diinginkan (Slamet 1978). Dalam hal ini, menyangkut struktur kekuasaan atau pengambilan keputusan, struktur tugas atau pembagian pekerjaan, dan struktur komunikasi, yaitu bagaimana aliran-aliran komunikasi terjadi dalam kelompok tersebut. Sudaryanti (2002) mengartikan struktur kelompok adalah bagaimana kelompok tersebut mengatur dirinya sendiri. Setiap kelompok memiliki struktur yang berbeda. Ketidak jelasan struktur akan menyebabkan ketidak jelasan peran, wewenang, kewajiban setiap anggota sehingga pelaksanaan kegiatan tidak dapat berlangsung secara efektif.
3. Fungsi tugas kelompok diartikan sebagai apa yang seharusnya dilakukan di dalam kelompok sehingga tujuan dapat dicapai. Purwanto dan Huraerah (2006) mendefinisikan fungsi tugas sebagai seperangkat tugas yang harus dilaksanakan oleh setiap anggota kelompok sesuai dengan fungsi dan kedudukan dalam struktur kelompok. Menurut Soedijanto (1980), tugas kelompok meliputi: Memberi kepuasan yakni tugas yang dipilih harus memberi kepuasan kepada para anggota sehingga termotivasi untuk melaksanakan dalam rangka mencapai tujuan, Mencari dan memberi keterangan yakni mencari dan memberi keterangan sebanyak mungkin kepada para anggota tentang segala hal dalam rangka mencapai tujuan kelompok, Koordinasi yakni bagaimana kelompok mengatur dirinya sendiri dalam melakukan tugas-tugas guna mencapai tujuannya, Inisiasi yakni bagaimana usaha kelompok untuk dapat menimbulkan inisiatif bagi para anggotanya, Desiminasi yakni cara bagaimana ide-ide dan gagasan disebarakan kepada seluruh anggota, dan Klarifikasi, yakni kemampuan kelompok untuk menjelaskan segala sesuatu yang masih diragukan dalam rangka mencapai tujuan kelompok.
4. Pembinaan dan pengembangan kelompok, adalah usaha menjaga kehidupan kelompok (Slamet 1978). Purwanto dan Huraerah (2006) mendefinisikan pembinaan dan pemeliharaan kelompok yaitu upaya kelompok untuk tetap memelihara dan mengembangkan kehidupan kelompok. Menurut Slamet (1978), usaha yang dilakukan dalam pembinaan dan pemeliharaan kelompok adalah: menimbulkan partisipasi, menyediakan fasilitas, menumbuhkan

- aktivitas, melakukan koordinasi, adanya komunikasi, menciptakan norma, mengadakan sosialisasi, dan mendapatkan anggota baru.
5. Kekompakan kelompok atau kesatuan kelompok adalah adanya keterikatan yang kuat diantara anggota kelompok (Slamet 1978). Purwanto dan Huraerah (2006) mengartikan kekompakan kelompok sebagai rasa keterikatan anggota kelompok terhadap kelompoknya. Menurut Slamet (1978) faktor-faktor yang mempengaruhi kekompakan kelompok meliputi: kepemimpinan kelompok; keanggotaan kelompok, nilai tujuan kelompok, homogenitas kelompok; integrasi, kerjasama kelompok, dan besarnya kelompok
 6. Suasana kelompok, adalah keadaan moral, sikap dan perasaan-perasaan umum yang terdapat dalam kelompok (Slamet 1978). Purwanto dan Huraerah (2006) memberi pengertian suasana kelompok sebagai lingkungan fisik dan nonfisik (emosional) yang akan mempengaruhi perasaan setiap anggota terhadap kelompoknya. Menurut Slamet (1978) suasana kelompok dipengaruhi oleh: ketegangan, keramahtamahan, kebebasan, keadaan lingkungan fisik, dan pelaksanaan prinsip demokrasi.
 7. Tekanan kelompok adalah sebagai segala sesuatu yang dapat menimbulkan ketegangan dalam kelompok. Purwanto dan Huraerah (2006) mengartikan tekanan kelompok sebagai tekanan-tekanan atau ketegangan dalam kelompok yang menyebabkan kelompok tersebut berusaha keras untuk mencapai tujuan kelompok. Menurut Slamet (1978), tekanan kelompok dapat bersumber: dari dalam, tuntutan/keinginan dari para anggota, dan dari luar, berupa tuntutan dan harapan pihak luar.
 8. Efektivitas kelompok diartikan Purwanto dan Huraerah (2006) sebagai keberhasilan kelompok untuk mencapai tujuannya, yang dapat dilihat pada tercapainya keadaan atau perubahan-perubahan (fisik maupun nonfisik) yang memuaskan anggotanya. Menurut Slamet (1978), efektivitas kelompok harus dilihat dari: Segi produktivitasnya yaitu keberhasilan mencapai tujuan kelompok, Moral berupa semangat dan sikap para anggotanya, dan Kepuasan yakni keberhasilan anggota mencapai tujuan-tujuan pribadinya.
 9. Agenda terselubung adalah tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh kelompok, yang diketahui oleh semua anggotanya, tetapi tidak dinyatakan secara tertulis.

Slamet (1978) mengartikan agenda terselubung lebih jauh, yaitu sebagai maksud-maksud terselubung yang mengacu kepada tujuan yang tidak nampak, yang dapat bersumber dari anggota, pimpinan maupun kelompok itu sendiri.

Pengukuran terhadap setiap unsur tersebut dilakukan dengan beberapa indikator yang menggambarkan intensitas dari unsur-unsur tersebut. Nilai kumulatif dari setiap unsur tersebut secara keseluruhan menggambarkan dinamika suatu kelompok (Shepherd, 1964; Cartwright & Zander, 1968; Beal *et al.*, 1974; Slamet, 2006). Tujuan kelompok merupakan apa yang ingin dicapai oleh kelompok, yaitu merupakan target yang akan dicapai di mana kegiatan-kegiatan kelompok ditujukan ke sana. Tujuan kelompok juga menyediakan kerangka di mana keputusan yang rasional harus dibuat untuk mengarahkan jumlah dan jenis kegiatan yang harus dilakukan (Beal *et al.*, 1974; Slamet, 2006).

Struktur kelompok adalah bagaimana kelompok itu berinteraksi di dalamnya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Struktur kelompok terdiri dari bagian-bagian kelompok dan juga hubungan antar bagiannya, yang terbagi ke dalam empat tipe yaitu :

1. aliran informasi
2. aliran pekerjaan
3. kewenangan
4. mobilitas orang).

Fungsi tugas adalah hal-hal yang harus dilakukan oleh kelompok agar tujuan kelompok dapat tercapai. Setiap posisi dalam kelompok yang diketahui oleh anggota lainnya akan memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan kelompok, dan kontribusi ini mewakili dari fungsi yang ditetapkan (Cartwright & Zander, 1968; Slamet, 2006).

Pembinaan dan pengembangan kelompok diartikan sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk menjaga kelompok agar tetap hidup. Usaha-usaha pembinaan dan pengembangan kelompok bisa dilakukan dengan mendorong dan mengembangkan partisipasi, aktivitas, koordinasi, komunikasi, menentukan standar, melakukan sosialisasi, menyediakan fasilitas dan mendapatkan anggota baru. Kekompakan kelompok merupakan kesatuan dan persatuan kelompok serta komitmen yang kuat dari seluruh anggota kelompok. Beberapa faktor yang

mempengaruhi kekompakan kelompok yaitu : kepemimpinan, rasa afiliasi anggota, nilai dari tujuan kelompok, homogenitas, keterpaduan, kerjasama dan besarnya kelompok.

Keefektifan kelompok atau keberhasilan kelompok dinilai akan cenderung meningkatkan dinamika kelompok. Keefektifan kelompok ini bisa dilihat dari berbagai sudut, yaitu : dari hasil atau produktivitasnya, dari segi moral kelompok, dan dari tingkat kepuasan anggota-anggotanya (Slamet, 2006). Beal *et al.* (1974) menggunakan istilah produktivitas kelompok , yang bisa dilihat dari beberapa sudut pandang, misalnya dari kelompok sendiri. Biasanya kelompok yang secara efektif memiliki tujuan yang realistis, serta secara efektif dan efisien mencapai tujuannya dikatakan sebagai kelompok yang produktif. Maksud terselubung merupakan program-program, tugas-tugas atau tujuan-tujuan yang tidak diketahui atau tidak disadari oleh para kelompok. Maksud terselubung juga penting artinya bagi kehidupan kelompok. Dalam hal ini kelompok bisa bekerja untuk maksud-maksud yang secara terbuka atau maksud-maksud yang terselubung pada saat yang sama. Sumber dari adanya maksud tersembunyi ini bisa berasal dari anggota kelompok, pimpinan kelompok atau kelompok itu sendiri (Slamet, 2006).

2.5 Partisipasi

2.5.1 Konsep Partisipasi

Menurut Cohen dan Uphoff (1977) dalam Kartasubrata (1986), partisipasi adalah istilah deskriptif yang mencakup berbagai kegiatan dan situasi yang beranekaragam karena besar sekali kemungkinan terjadinya kesalahpahaman tentang sebab dan akibat, ruang lingkup dan penyebarannya. Sedangkan menurut Soelaiman (1985) dalam Susiatik (1998), partisipasi anggota masyarakat dalam kegiatan pembangunan yaitu adanya sikap mendukung dan adanya keterlibatan masyarakat secara individu, kelompok atau ke dalam kesatuan bersama, perencanaan dan pelaksanaan program atas dasar tanggung jawab sosial. Ada beberapa macam atau bentuk partisipasi yang dikemukakan oleh para ahli, antara lain menurut Yadov (1980) dalam Susiatik (1998) menjelaskan ada empat macam kegiatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan yaitu:

1. Partisipasi dalam pembuatan perencanaan dan partisipasi dalam pengambilan keputusan
2. Partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan
3. Partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi
4. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan.

Syarat-syarat yang diperlukan untuk berpartisipasi rakyat dapat dikelompokkan dalam tiga golongan (Slamet *dalam* Kartasubrata, 2002) :

1. Ada kesempatan untuk membangun / untuk ikut dalam pembangunan
2. Kemampuan untuk memanfaatkan kesempatan itu
3. Ada kemauan untuk berpartisipasi

Dimensi partisipasi mencakup jenis partisipasi yang sedang diselenggarakan, kelompok-kelompok perorangan yang terlibat dalam partisipasi tersebut dan berbagai cara bagaimana terjadinya proses partisipasi tersebut. Sedangkan konteks partisipasi berfokus pada hubungan antara ciri-ciri proyek pembangunan pedesaan dan pola-pola partisipasi yang ada dalam lingkungan daerah lokasi proyek. Sastropetro (1986) *dalam* Santosa (1999) membagi faktor yang mempengaruhi partisipasi seseorang menjadi tiga hal:

1. Keadaan sosial masyarakat yang tingkat pendidikan, pendapatan, kebiasaan dan kedudukan dalam sistem sosial
2. Kegiatan program pembangunan, kegiatan ini merupakan kegiatan yang dirumuskan dan dikendalikan oleh pemerintah
3. Keadaan alam sekitar yang mencakup faktor fisik atau keadaan geografis daerah yang ada pada lingkungan tempat hidup masyarakat tersebut.

Delli Priscolli (1997) *dalam* Suporahardjo (2005) mengemukakan bahwa nilai inti dari partisipasi adalah sebagai berikut :

1. Masyarakat harus punya suara dalam keputusan tentang tindakan yang mempengaruhi kehidupan mereka
2. Partisipasi masyarakat meliputi jaminan bahwa kontribusi masyarakat akan mempengaruhi keputusan
3. Proses partisipasi masyarakat mengkomunikasikan dan memenuhi kebutuhan proses semua partisipasi

4. Proses partisipasi masyarakat berupaya dan memfasilitasi keterlibatan mereka yang berpotensi untuk berpengaruh
5. Proses partisipasi melibatkan partisipasi dalam mendefinisikan bagaimana berpartisipasi
6. Proses partisipasi masyarakat mengkomunikasikan kepada partisipan bagaimana input mereka digunakan atau tidak digunakan.
7. Proses partisipasi masyarakat memberi partisipasi informasi yang mereka butuhkan dengan cara yang bermakna.

Menurut Pujo (2003) pada kegiatan PMDH, masyarakat belum terlibat dengan baik pada semua tahap kegiatan bahkan pada tahap perencanaan dan pengendalian tingkat keterlibatannya masih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa aspek perencanaan dan pengendalian kegiatan belum sepenuhnya melibatkan masyarakat. Pada kegiatan PHBM, masyarakat juga belum terlibat baik pada semua tahapan kegiatan. Walaupun demikian telah menunjukkan intensitas yang lebih baik jika dibandingkan pada program PMDH. Masyarakat pada umumnya berpartisipasi pada kegiatan yang dirasa memberikan manfaat langsung pada mereka yaitu pada tahap pelaksanaan dan pemanfaatan hasil.

2.5.2 Tipologi Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

Partisipasi menurut para ahli diklasifikasikan kedalam beberapa tipologi atau tingkatan. Terdapat tujuh tipologi partisipasi yang menggambarkan bagaimana masyarakat berpartisipasi dalam program dan proyek pembangunan. Adapun tujuh tipologi tersebut berturut-turut semakin dekat kepada bentuk yang ideal (Khan, 1997; Pretty & Vodouh  (1997); Pretty 1995 diacu dalam Syahyuti 2006) yaitu :

1. Partisipasi pasif atau manipulatif (*Passive Participation*). Tipe ini merupakan bentuk partisipasi yang paling lemah. Masyarakat berpartisipasi dengan cara diberitahu apa yang sedang atau telah terjadi. Pengumuman sepihak oleh pelaksana proyek tidak memperhatikan tanggapan masyarakat sebagai sasaran program. Informasi yang dipertukarkan terbatas pada kalangan profesional di luar kelompok sasaran.
2. Partisipasi informatif (*Participation in Information Giving*). Masyarakat berpartisipasi dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pihak proyek melalui survey kuesioner atau semacamnya. Masyarakat tidak

- memiliki kesempatan untuk terlibat dan mempengaruhi proses keputusan. Akurasi hasil studi juga tidak dibahas bersama masyarakat.
3. Partisipasi konsultatif (*Participation by Consultation*). Masyarakat berpartisipasi dengan cara berkonsultasi, sedangkan tenaga ahli dari luar mendengarkan serta menganalisa masalah dan pemecahannya. Dalam pola ini belum ada peluang untuk pembuatan keputusan bersama. Ahli dari luar tidak ada kewajiban untuk mengambil pandangan masyarakat untuk ditindaklanjuti.
 4. Partisipasi insentif (*Participation for Material Incentive*). Masyarakat berpartisipasi dengan memberikan sumberdaya misalnya jasa tenaga kerja dan memperoleh imbalan berupa bahan pangan, upah, atau insentif lainnya. Masyarakat tidak dilibatkan dalam proses pembelajaran yang dilakukan. Masyarakat juga tidak memiliki andil untuk melanjutkan kegiatan setelah insentif dihentikan.
 5. Partisipasi fungsional (*Functional Participation*). Masyarakat berpartisipasi dengan membentuk kelompok sebagai bagian dari proyek, setelah ada keputusan-keputusan utama yang disepakati. Pada tahap awal, masyarakat tergantung dari pihak luar, tetapi secara bertahap kemudian menunjukkan kemandiriannya.
 6. Partisipasi interaktif (*Interactive Participation*). Masyarakat berperan dalam proses analisis untuk perencanaan kegiatan dan pembentukan atau penguatan kelembagaan. Masyarakat memiliki peran untuk mengontrol atas pelaksanaan keputusan-keputusan mereka, sehingga memiliki andil dalam keseluruhan proses kegiatan.
 7. Mandiri (*Self-Mobilization*). Masyarakat mengambil inisiatif sendiri secara bebas (tidak dipengaruhi oleh pihak luar) untuk merubah sistem atau nilai-nilai yang mereka junjung. Mereka mengembangkan kontak dengan lembaga-lembaga lain untuk mendapatkan bantuan dan dukungan teknis serta sumberdaya yang diperlukan. Masyarakat juga memegang kendali atas pemanfaatan sumberdaya yang ada atau digunakan. Berdasarkan tipologi tersebut, penggunaan terminologi “partisipasi” dalam pembangunan harus selalu dikaitkan dengan tipologi partisipasi yang mana. Apabila tujuan dari pembangunan adalah untuk tercapainya pembangunan yang berkelanjutan

(*sustainable development*), paling tidak tingkat partisipasi yang harus terpenuhi yaitu partisipasi fungsional.

2.5.3 Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan

Berdasarkan hasil penelitian Salam *et al.* (2005) beberapa faktor yang diperlukan demi berlangsungnya partisipasi petani yang berkelanjutan dalam pengelolaan kehutanan yang partisipatif adalah bahwa partisipasi berkelanjutan memiliki korelasi secara positif dan nyata dengan :

1. Tingkat kepuasan peserta terhadap jenis yang ditanam dalam arealnya
2. Tingkat kepercayaan peserta bahwa kebutuhannya untuk memperoleh hasil diperhatikan
3. Tersedianya pelatihan terhadap berbagai aspek teknis kehutanan partisipatif; dan
4. Kontribusi sumbangan dana peserta kepada dana penanaman kelompok.

Sedangkan keberlanjutan partisipasi memiliki hubungan yang negatif dan nyata dengan adanya gangguan terhadap kepentingan masyarakat lokal dalam penerapan program kehutanan partisipatif, dan jangka waktu yang lama dari saat perjanjian kerjasama sampai pemanenan hasil kayu. Dalam konteks kehutanan masyarakat, Beukeboom (1994) menekankan pentingnya partisipasi komunitas lokal untuk terjaminnya kelestarian hasil hutan dan jasa lingkungan lainnya. Program-program kehutanan masyarakat mendasarkan kepada partisipasi komunitas lokal di dalam perencanaan dan penerapan rencana pengelolaan lahannya.

Partisipasi dari komunitas ini juga menjamin bahwa perencanaan pengelolaan lahan telah sesuai dengan kendala-kendala lingkungan dan aspek sosial. Seymour (1991) menekankan bahwa partisipasi masyarakat dalam kehutanan masyarakat bermakna mengambil bagian dalam pengambilan keputusan, dan tidak hanya sekedar berperan sebagai tenaga kerja. Selanjutnya partisipasi masyarakat menurut Bhattacharya dan Basnyat (2003) harus difokuskan kepada kegiatan kehutanan mulai dari perencanaan, penerapan, monitoring dan evaluasi dengan pembagian hasil yang adil sehingga tercapai pendapatan masyarakat secara berkelanjutan sebagai salah satu kriteria penting dalam pemberdayaan.

Apabila dikaitkan dengan prinsip-prinsip keterkaitan antara masyarakat dengan hutan, Colfer *et al.* (1995) menyatakan bahwa peran penting partisipasi dalam pengelolaan hutan yang lestari sangat terkait dengan sistem budaya untuk kesejahteraan masyarakat dikombinasikan dengan keberagaman sistem tersebut antar ruang dan waktu. Tanpa partisipasi aktif dari para aktor dalam pengelolaan hutan, tidak akan ada mekanisme yang sesuai untuk mengkomunikasikan aspek-aspek budaya yang relevan terhadap pemangku kepentingan lainnya. Berdasarkan pandangan para aktor kehutanan, salah satu fungsi penting dari partisipasi adalah dalam hal penyediaan ruang bagi masyarakat lokal untuk mengontrol kecepatan dan arah perubahan dalam kehidupan masyarakat lokal yang berbasis kepada sumberdaya hutan.

Berdasarkan hasil penelitian Colfer dan Wadley (1996) di kawasan Suaka Margasatwa Danau Sentarum (Kalimantan Barat), yang merupakan hutan konservasi, tingkat partisipasi masyarakat lokal dalam pengelolaan sumberdaya alam hutan secara lestari berada pada tipologi enam dan tujuh atau partisipasi interaktif dan mandiri. Masyarakat lokal terlibat dalam analisis bersama dan membentuk kelompok lokal baru atau memperkuat kelompok yang sudah ada. Kelompok lokal ini memiliki kontrol terhadap keputusan lokal. Masyarakat juga mempunyai inisiatif untuk merubah sistem yang ada.

